

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas, oleh karenanya dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sangatlah wajar jika terdapat kekurangan, dan tentunya sangat kami harapkan ada saran dan kritik guna perbaikan penyusunan LAKIP di masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran.

Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra SKPD dan Renja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Terakhir kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu dalam penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru tahun 2017 ini.

Harapan kami semoga LAKIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparat di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Banjarbaru, Januari 2018

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Banjarbaru,

Ir. H. PUSPA KENCANA, MP

Pembina Tk. I
NIP. 19640427 199103 2 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Maksud dan Tujuan	9
C. Tugas Pokok dan Fungsi	10
1. Struktur Organisasi	12
2. Personil	14
3. Sarana dan Prasarana	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Program dan Kegiatan	16
B. Pembiayaan	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	26
BAB IV PENUTUP.....	81

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru selama Tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan

indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru untuk Tahun 2017 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 89,18 %.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya,

sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru.

Terlebih lagi sesuai dengan misi Kota Banjarbaru untuk tahun 2018 mendatang, bahwa Banjarbaru akan berinovasi maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, akan terus berusaha dan mencoba berinovasi untuk kedepan yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana yang ada dengan segala keterbatasannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pertanggung jawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian, indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru Tahun 2017 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak - pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru Tahun 2017 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yang diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2016, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Walikota) melalui Sekretris Daerah.

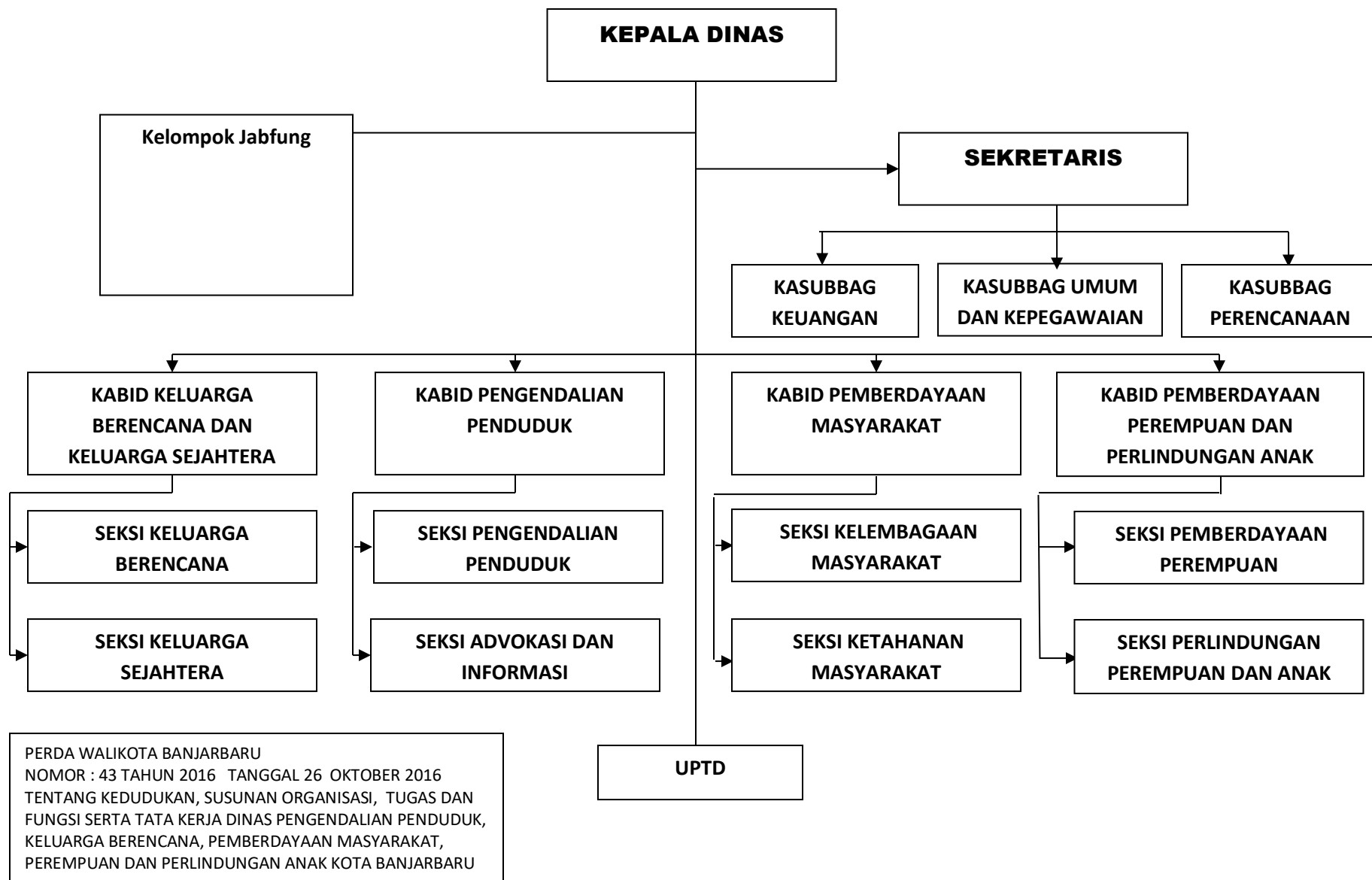
Selanjutnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai :

1. Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak; dan,
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Struktur Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru disusun dalam struktur organisasi sebagai berikut :



C.2. Personil

Personil yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset / modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		GOLONGAN	JUMLAH		ESELON	JUMLAH	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
1	SD			I/a			non eselon	3	25
2	SLTP			I/b			I.a		
3	SLTA	6	10	I/c			I.b		
4	D-I			I/d			II.a		
5	D-II			II/a			II.b		1
6	D-III	1	2	II/b			III.a	1	
7	D-IV			II/c	1	2	III.b	2	2
8	S-1	4	26	II/d			IV.a	2	10
9	S-2	3	6	III/a			IV.b	1	
10	S-3			III/b	2	5	V.a		
11	Pendidikan Profesi			III/c	1	9	V.b		
12				III/d	2	10			
13				IV/a	2	5			
14				IV/b	1	7			
15				IV/c		1			
16				IV/d					
17				IV/e					
	JUMLAH	14	44	JUMLAH	9	38	JUMLAH	9	38

C.3. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	JUMLAH	KETR.
1.	Mobil Roda 4	3 buah	
2.	Mobil Bus	3 buah	
3.	Sepeda Motor	42 buah	
4.	Komputer PC	17 buah	
5.	Laptop	10 buah	
6.	Bangunan Kantor	1 buah	
7.	Bangunan Kantor (Balai)	2 buah	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PROGRAM dan KEGIATAN

Dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, dibuatlah beberapa Program dan Kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Non PNS
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Perencanaan dan Laporan Keuangan
 - Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Asset / Barang.
4. Program Keluarga berencana, dengan kegiatan :
- Pembinaan Keluarga Berencana
 - Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana
 - Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS
 - Pelaksanaan, Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi KB (Gudang Alkon)
 - Kesehatan Reproduksi Remaja
 - Kampung KB
5. Program Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan kegiatan :
- Fasilitasi Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - Penyusunan Laporan Kependudukan dan KB
6. Program Pengendalian Kependudukan, dengan kegiatan :

- Desiminasi Dampak kependudukan
 - Pembinaan Forum Kerjasama Pengendalian Kependudukan
7. Program Peningkatan Dukungan Sarana Pelayanan KB, dengan kegiatan :
- Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan dan Penyuluh KB (DAK)
 - Pembangunan Alih/Fungsi Balai Penyuluhan (DAK)
8. Program Peningkatan Dukungan Operasional KKBPK Lini Lapangan, dengan kegiatan :
- Operasional Bagi Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik).
9. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
- Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - Lomba Kelurahan
 - Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan
 - Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat
 - Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan
10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan :
- Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu
 - Pembinaan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Gelar Sosialisasi Tepat Guna
11. Program Kesenjangan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan kegiatan :
- Rintisan Kota Layak Anak
12. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan :
- Pembinaan P2WKSS, Kader PKK dan Posyandu
 - Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri
 - Perlindungan Perempuan dan Anak
13. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
- Sosialisasi Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
 - Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
 - Pembinaan Organisasi DWP
 - Pembinaan Organisasi Gatriwara
 - Pembinaan Organisasi Wanita

B. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terurai dengan program dan kegiatan tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru berdasarkan perincian biaya yang

terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru tahun 2017, dapat dilihat pada table berikut :

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,008,251,350
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,300,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,350,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,200,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11,300,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,077,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,850,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,200,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	42,874,000
: 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	782,580,350
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Non PNS	134,520,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	264,575,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2,000,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan Meubelair	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	35,000,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebutuhan Dinas / Operasional	212,975,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2,500,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12,100,000

2.08 . 2.08.01 . 01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31,550,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,000,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Keuangan	12,000,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Asset / Barang	7,550,000
2.02 . 2.08.01 . 01 . 15	Progran Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	79,015,050
2.02 . 2.08.01 . 01 . 15 . 06	Rintisan Kota Layak Anak	79,015,050
2.02 . 2.08.01 . 01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	171,748,550
2.02 . 2.08.01 . 01 . 17 . 10	Pembinaan P2WKSS, Kader PKK dan Posyandu	82,563,000
2.02 . 2.08.01 . 01 . 17 . 11	Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri	65,709,900
2.02 . 2.08.01 . 20 . 04	Perlindungan Perempuan dan Anak	23,475,650
2.02 . 2.08.01 . 01 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	413,906,000
2.02 . 2.08.01 . 01 . 18 . 10	Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	39,441,000
2.02 . 2.08.01 . 01 . 18 . 12	Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	124,280,000
2.02 . 2.08.01 . 01 . 18 . 13	Pembinaan Organisasi DWP	120,800,000
2.02 . 2.08.01 . 01 . 18 . 14	Pembinaan Organisasi Gatriwara	63,256,000
2.02 . 2.08.01 . 01 . 18 . 15	Pembinaan Organisasi Perempuan	66,129,000
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.07 . 2.08.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	354,493,750
2.07 . 2.08.01 . 01 . 20 . 02	Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	26,447,100
2.07 . 2.08.01 . 01 . 20 . 03	Lomba Kelurahan	233,805,000
2.07 . 2.08.01 . 01 . 20 . 08	Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan	25,934,000
2.07 . 2.08.01 . 01 . 20 . 09	Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	28,307,650
2.07 . 2.08.01 . 01 . 20 . 07	Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan	40,000,000

2.07 . 2.08.01 . 01 . 21	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	748,750,000
2.07 . 2.08.01 . 01 . 21 . 01	Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu	250,630,100
2.07 . 2.08.01 . 01 . 21 . 03	Pembinaan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	454,170,000
2.07 . 2.08.01 . 01 . 21 . 04	Gelar Sosialisasi Tepat Guna	43,949,900
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15	Program Keluarga Berencana	439,018,800
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	144,350,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 07	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Keluarga berencana	96,356,900
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 08	Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS	80,615,900
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 11	Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasespsi KB (Gudang Alkon)	18,350,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 12	Kesehatan Reproduksi Remaja	62,879,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 14	Kampung KB	36,467,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 24	Program Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	143,791,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 24 . 01	Fasilitasi Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan keluarga Berencana	113,416,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 24 . 02	Penyusunan Laporan Kependudukan dan KB	30,375,000
2.06 . 2.08.01 . 01 . 16	Program Pengendalian Kependudukan	94,300,000
2.06 . 2.08.01 . 01 . 16 . 01	Desiminasi Dampak Kependudukan	56,850,000
2.06 . 2.08.01 . 01 . 16 . 02	Pembinaan Forum Kerjasama Pengendalian Kependudukan	37,450,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25	Peningkatan Dukungan Sarana Peningkatan Pelayanan KB	929,000,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 01	Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan dan Penyuluh KB (DAK)	550,000,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 02	Pembangunan Alih/Fungsi Balai Penyuluhan (DAK)	379,000,000

2.08 . 2.08.01 . 01 . 26	Program Peningkatan Dukungan Operasional KKBPK Lini Lapangan	336,750,000
2.08 . 2.08.01 . 01 . 26 . 01	Operasional Bagi Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	336,750,000
J U M L A H S E M U A		5.015.149.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam Prestasi Kerja yang diukur berdasarkan Tolok Ukur Keluaran dan Hasil yang diperoleh atas Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsinya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru disusun sebagai wujud Pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan Misi dapat diukur melalui Evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru maka ditetapkanlah Indikator Kinerja, yang mana Capaian Indikator Kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak

terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, sesuai dengan struktur organisasi serta mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru. Yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 43 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru yang diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2016, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Walikota) melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan juga sesuai dengan pendanaan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2017, yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disusunlah analisis atas capaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran yang dapat diukur dengan Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	HASIL
1.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata jumlah anak perkeluarga - Cakupan peserta KB Baru - Cakupan peserta KB aktif (terhadap jumlah PUS) - Rasio Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I - Jumlah PUS peserta KB anggota UPPKS 	1 orang 12 % 70 % 3 % 756 org	2 orang 15 % 75 %	Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan KB
	a. Pembinaan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan ke Kader KB di 5 (lima) Kecamatan. - Profil Lomba Program KB - Temu Kader KB/ Forum LMP 	30 Kali 20 buah 2 kali	30 kali 20 buah 2 kali	Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan KB
	b. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi KB	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan KB Keliling (Tim Muyan) - Temu Penyuluh KB Nasional 	10 bulan 1 kali	10 bualn 1 kali	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KB
	c. Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis UPPKS, Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL) - Sosialisasi UPPKS, lomba-lomba orientasi ketahanan keluarga, orientasi kemitraan 	1 Kali 3 Kali	1 Kali 3 Kali	Terlaksananya Sosialisasi, lomba-lomba orientasi, UPPKS, BKB dan Kemitraan, orientasi ketahanan keluarga.

	d. Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi KB (Gudang Alkon)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendistribusian Obat - Pelaksanaan Stock Opname 	20 Kali 2 Kali	20 Kali 2 Kali	Terlaksananya Pendistribuasian Obat ke Klinik se Kota Banjarbaru
	e. Kesehatan Reproduksi Remaja	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan PIK KRR - Rakerda 	4 Kali 1 Kali	4 Kali 1 Kali	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Operasional
	f. Kampung KB	<ul style="list-style-type: none"> - Honor Petugas Kampung KB - Pembentukan Kampung KB 	1 orang 4 buah	1 orang 4 buah	Jumlah Kampung KB yang terbetuk
2.	PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN SARANA PELAYANAN KB	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Sarana Transportasi - Cakupan Pembangunan Balai 	100 % 100 %		
	a. Pengadaan Sarana Transformasi Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Mobil Bis Jemput antar Akseptor KB 	1 buah	1 buah	Menngkatkan sarana Transfortasi Pelayanan dan Penyuluhan KB
	b. Pembangunan alih/ Fungsi Balai Penyuluhan (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Balai Penyuluh KB 	1 buah	1 buah	Meningkatkan Sarana Penyuluhan KB

3.	PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN OPERASIONAL KKBPK LINI LAPANGAN	- Cakupan Dukungan Operasional	100 %		
	a. Operasional bagi Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	- Rapat Teknis Kelompok KB - Terlaksana Pemeliharaan Balai Penyuluh - Terlaksananya Kegiatan-kegiatan di Kampung KB	96 Kali 2 Paket 25 Kegiatan	96 Kali 2 Paket 25 Kegiatan	Terlaksananya Bantuan Operasional KB
4.	PROGRAM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN	- Cakupan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	100 %		
	a. Desiminasi Dampak Kependudukan	- Sosialisasi Dampak Peningkatan Jumlah Penduduk	480 orang	480 orang	Laju Pertumbuhan Penduduk yang seimbang
	b. Pembinaan Forum Kerjasama Pengendalian Kependudukan	- Fasilitasi Koalisi Kependudukan Kota Banjarbaru - Sosialisasi Pernikahan Dini	1 Kegiatan 75 Orang	1 Kegiatan 75 Orang	Laju Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	- Cakupan Data dan Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	100 %		
	a. Penyusunan Laporan Kependudukan dan KB	- Laporan Umpan Balik - Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana - Reviu Umpan Balik	12 bulan 10 buah 2 kegiatan	12 bulan 10 buah 2 kegiatan	Tersajinya Data dan Buku Informasi Kependudukan dan KB

	b. Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan KB	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran Data Keluarga - Data Analisa Hasil Pendataan Keluarga - Data Rekap Laporan Dalap dan Pelkon - Orientasi Pendataan Keluarga - Orientasi Pencatatan Pelaporan KB - Rapat Koordinasi Pendataan - Sarasehan Pendataan Keluarga Tk. Kota, Kecamatan dan Seluruh Kampung KB - Sosialisasi Updeting data keluarga - Penyuluhan KB 	55.000 KK 10 bulan 12 bulan 250 orang 50 orang 3 kali 7 kali 1 kali 1 kali	55.000 KK 10 bulan 12 bulan 250 orang 50 orang 3 kali 7 kali 1 kali 1 kali	Data Statistik Rutin dan Informasi KB dan Data Keluarga Kota Banjarbaru
6.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	- LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi	26 LPM		
	a. Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya Gerbangmas Taskin - Peningkatan Wawasan 	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	Terwujudnya Kestinambungan Program Gerbangmas Taskin
	b. Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pencanaan BBGRM Tingkat Kota - Peningkatan Wawasan 	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	Terwujudnya Kestinambungan Program Gerbangmas

		- Pencanaan BBGRM Tingkat Provinsi	1 kali	1 kali	Taskin
	c. Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan	- Terlaksananya Pertemuan Rutin LPM - Terlaksananya Sosialisasi Program Kegiatan LPM	5 kali 5 kali	5 kali 5 kali	Terlaksananya Kegiatan Rutin
	d. Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	- Sosialisasi KPM	3 kali	3 kali	Terlaksananya Sosialisasi KPM
	e. Lomba Kelurahan	- Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kelurahan melalui Lomba Kelurahan	5 kali	5 kali	Juara Kelurahan Tingkat Kota Banjarbaru
7.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	- Cakupan Penerapan Teknologi Tepat Guna - Posyandu Aktif - Pkk Aktif	100 % 225 Posyandu 26 PKK		
	a. Gelar Sosialisasi Tepat Guna	- Sosialisasi Posyantek - Lomba GTTG Tk. Kota - Mengikuti GTTG Tk. Nasional	1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 1 kali	Terlaksananya Sosialisasi Posyantek, Lomba GTTG, Tk. Kota dan Tk. Nasional
	b. Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Pesyandu	- Pertemuan Kader Posyandu se Kota Banjarbaru	195 Posyandu	195 Posyandu	Menigkatnya Pengetahuan dan Kinerja Kader
	c. Pembinaan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan	- Rakon PKK - Jambore PKK	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	Terlaksananya Kegiatan-kegiatan PKK

	Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Lomba-Lomba PKK - Sosialisasi 	1 kali 10 kali	1 kali 10 kali	
8.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Kelurahan Ramah Anak 	55 %		
	a. Rintisan Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Kelurahan Ramah Anak - Pelatihan Kepemimpinan PAD - Sosialisasi FAD 	4 kali 1 Kali 4 Kali	4 kali 1 Kali 4 Kali	Peningkatan Pemahaman tentang Rintisan Kota Layak Anak
9.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<ul style="list-style-type: none"> - Ratio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 	0,03 %		
	a. Pembinaan P2WKSS, Kader PKK dan Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan P2WKSS dan GSI - Sosialisasi P2WKSS dan GSI - Pelatihan Keterampilan Wanita - Konsultasi dan Koordinasi 	2 kali 2 kali 1 kali 1 kali	2 kali 2 kali 1 kali 1 kali	Terlaksananya Pembinaan P2WKSS dan GSI
	b. Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Desa Prima - Konsultasi /Koordinasi keluar Daerah 	5 kali 1 kali	5 kali 1 kali	Meningkatkan kesejahteraan perempuan di kelurahan
	c. Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Satgas P2TP2A dan Sosialisasi P2TP2A 	2 kali	2 kali	Terlaksananya Sosialisasi Satgas P2TP2A dan Sosialisasi

					P2TP2A
10.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Organisasi / Lembaga Wanita yang di bina - Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 	48 buah 294,34 %		
	a. Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan dan Keterampilan Teknis para Aparatur 	2 kali	2 kali	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan PUG dan Kompetensi SDM Perencanaan dalam melaksanakan PPRG
	b. Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional - Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam - Terlaksananya Kegiatan Rutin Bulanan - Terlaksananya Pelatihan Keterampilan 	1 kali 1 kali 10 kali 1 kali	1 kali 1 kali 10 kali 1 kali	Terlaksananya Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
	c. Pembinaan Organisasi DWP	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional - Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam - Terlaksananya Kegiatan Rutin Bulanan 	1 kali 1 kali 12 kali	1 kali 1 kali 12 kali	Terlaksananya Pembinaan Organisasi DWP

		<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pelatihan Keterampilan - Terlaksananya Seminar 	<p>1 kali</p> <p>1 kali</p>	<p>1 kali</p> <p>1 kali</p>	
	d. Pembinaan Organisasi Gatriwara	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pelatihan Keterampilan - Terlaksananya Kegiatan Rutin Bulanan - Terlaksananya Ceramah Agama 	<p>2 kali</p> <p>12 kali</p> <p>4 kali</p>	<p>2 kali</p> <p>12 kali</p> <p>4 kali</p>	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Gatriwara
	e. Pembinaan Organisasi Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan 	<p>3 kali</p>	<p>3 kali</p>	Terwujudnya Pelaksanaan PHBN, Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perempuan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 Rp. 5.015.149.500,--

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 Rp. 4.280.369.660,--

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru didukung Dana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017, serta dana yang sudah terealisasi dapat dilihat pada table berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Pagu	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	<u>439.018.800,--</u>	<u>356.945.800,--</u>	<u>82.064.000,--</u>	<u>81,31 %</u>	
	Pembinaan Keluarga berencana	144.350.000,--	93.212.000,--	51.138.000,--	64,57 %	86 %
	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana	96.356.900,--	69.561.900,--	26.795.000,--	72,19 %	72 %
	Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS	80.615.900,--	80.434.900,--	181.000.000,--	99,78 %	100 %
	Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi KB (Gudang Alkon)	18.350.000	15.600.000,--	2.750.000,--	85,01 %	100 %
	Kesehatan Reproduksi Remaja	62.879.000,--	61.679.000,--	1.200.000,--	98,09 %	100 %
	Kampung KB	36.467.000,--	36.467.000,--	---	100 %	100 %
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	<u>143.791.000,--</u>	<u>80.138.100,--</u>	<u>63.652.900,--</u>	<u>55,73 %</u>	
	Fasilitasi Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	113.416.000,--	59.075.600,--	54.340.400,--	52,09 %	100 %
	Penyusunan Laporan Kependudukan dan Keluarga Berencana	30.375.000,--	21.062.500,--	9.312.500,--	69,34 %	100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Pagu	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
3	PROGRAM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN	<u>94.300.000,--</u>	<u>88.549.000,--</u>	<u>5.751.000,--</u>	<u>93,90 %</u>	
	Desiminasi Dampak Kependudukan	56.850.000,--	53.100.000,--	3.750.000,--	93,40 %	100 %
	Pembinaan Forum Kerjasama Pengendalian Kependudukan	37.450.000,--	35.449.000,--	2.001.000,--	94,66 %	100 %
4.	PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN SARANA PENINGKATAN PELAYANAN KB	<u>929.000.000,--</u>	<u>690.036.678,--</u>	<u>238.963.322,--</u>	<u>74,28 %</u>	<u>100 %</u>
	Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan dan Penyuluh KB (DAK)	550.000.000,--	356.696.678,--	193.303.322,--	64,85 %	100 %
	Pembangunan Alih/Fungsi Balai Penyuluh (DAK)	379.000.000,--	333.340.000,--	45.660.000,--	87,95 %	100 %
5.	PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN OPERASIONAL KKBPK LINI LAPANGAN	<u>336.750.000,--</u>	<u>167.895.000</u>	<u>168.855.000,--</u>	<u>49,86 %</u>	
	Operasional Bagi Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	336.750.000,--	167.895.000,--	168.855.000,--	49,86 %	50 %
6.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	<u>354.493.750,--</u>	<u>334.988.600,--</u>	<u>19.505.150,--</u>	<u>94,50 %</u>	
	Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	26.447.100,--	23.425.000,--	3.022.100,--	88,57 %	100 %
	Lomba Kelurahan	233.805.000,--	229.305.000,--	4.500.000,--	98,08 %	100 %
	Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan	25.934.000,--	21.402.000,--	4.532.000,--	82,52 %	100 %
	Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	28.307.650,--	21.556.600,--	6.751.050,--	76,15 %	100 %
	Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan	40.000.000,--	39.300.000,--	700.000,--	98,25 %	100 %
7.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>748.750.000,--</u>	<u>742.396.000,--</u>	<u>6.354.000,--</u>	<u>99,15 %</u>	
	Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu	250.630.100,--	250.241.100,--	389.000,--	99,84 %	100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Pagu	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	454.170.000,--	451.460.000,--	2.710.000,--	99,40 %	100 %
	Gelar Sosialisasi Tepat Guna	40.000.000,--	40.694.900,--	3.255.000,--	92,59 %	100 %
8.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	<u>79.015.050,--</u>	<u>69.560.000,--</u>	<u>9.455.050,--</u>	<u>88,03 %</u>	
	Rintisan Kota Layak Anak	79.015.050,--	69.560.000,--	9.455.050,--	88,03 %	100 %
9.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<u>171.748.550,--</u>	<u>163.071.300,--</u>	<u>8.677.250,--</u>	<u>92,62 %</u>	
	Pembinaan P2WKSS, Kader PKK dan Posyandu	82.563.000,--	82.075.500,--	487.500,--	99,41 %	100 %
	Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri	65.709.900,--	59.359.500,--	6.350.400,--	90,34 %	100 %
	Perlindungan Perempuan dan Anak	23.475.650,--	21.636.300,--	1.839.350,--	92,16 %	100 %
10	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	<u>413.906.000,--</u>	<u>382.824.805,--</u>	<u>31.081.195,--</u>	<u>92,49 %</u>	
	Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	39.441.000,--	36.572.370,--	2.868.630,--	92,73 %	100 %
	Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	124.280.000,--	112.805.000,--	11.475.000,--	90,77 %	100 %
	Pembinaan Organisasi DWP	120.800.000,--	107.338.000,--	13.462.000,--	88,86 %	92,30 %
	Pembinaan Organisasi Gatriwara	63.256.000,--	63.256.000,--	---	100 %	100 %
	Pembinaan Organisasi Perempuan	66.129.000,--	62.853.435,--	3.275.565,--	95,05 %	100 %

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru selama tahun 2017, sesuai dengan relaisasi kegiatan yang telah dicapai adalah :

1. **Pada Program Keluarga Berencana dengan Kegiatan :**

- **Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana**, dengan indicator kinerja Pembinaan ke Kader KB di 5 Kecamatan, Pelaksanaan Lomba Profil Program KB, serta temu kader KB / Forum LMP, dimana dari pagu yang telah disediakan sebesar Rp. 144.350.000,-
- terealisasi sebesar Rp. 93.211.000,-- atau setara dengan 65 %, realisasi pekerjaannya mencapai 86 % ini dikarenakan tidak terealisasi honor nara sumber, karena berkaitan dengan pelayanan momentum Keluarga Berencana yang tidak terealisasi.

Solusi yang akan dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, kami akan membuat jadwal kegiatan pelayanan KB lebih awal.

- **Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Keluarga berencana**, dengan indicator kinerja Pelayanan KB Keliling dengan jumlah 50 kali Pelayanan dan Temu Penyuluh KB Nasional 1 kali, dengan pagu yang tersedia sebesar Rp. 96.356.900,-- terrealisasi sebesar Rp. 69.561.900,-- atau setara dengan 72 %, sementara realisasi pekerjaan untuk Temu Penyuluh KB Nasional sudah diikuti sebanyak 1 kali atau sudah mencapai 100 % tetapi untuk realisasi Pelayanan KB Keliling sudah terlaksana 36 kali atau 72 % ini dikarenakan pada saat melakukan pelayanan KB dijadwalkan menunggu momen-momen tertentu (Baksos TNI, PGRI, IBI), dimana kenyataannya momen tersebut tidak dilaksanakan

sehingga untuk pelaksanaan pelayanan KB tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Solusi yang akan dilaksanakan adalah agar pelayanan KB yang mengikut pada acara momen-momen (Baksos TNI, PGRI, IBI) dll, agar nantinya dapat dikoordinasikan dengan organisasi /mitra kerja dengan lebih intensif.

- **Kegiatan Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS**, kegiatan ini adalah suatu pemberdayaan yang merupakan istilah yang populer dalam berbagai aspek kehidupan, terlebih pemberdayaan telah menjadi isu penting dalam pembangunan yang melalui ketahanan fungsi keluarga. memberikan informasi kepada masyarakat tentang program peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PKLK). Kita ketahui bahwa kondisi lingkungan keluarga sebagian kurang kondusif baik yang menyangkut lingkungan fisik ataupun lingkungan non fisik terutama keluarga miskin atau yang tergolong Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera 1. untuk itu dilaksanakan beberapa program pemerintah yang memberikan kontribusi untuk masyarakat yaitu pembinaan BKB, BKR, BKL, UPPKS dan Keluarga Harmonis, dengan maksud Mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan dan Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya

alam bidang agribisnis maupun bidang –bidang yang lain dan bertujuan Meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal lingkungan keluarga yang kondusif dan ketahanan keluarga. dengan indicator kinerja Bimbingan Teknis UPPKS, Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL) sebanyak 1 kali dan Sosialisasi UPPKS, Lomba-Lomba Orientasi ketahanan Keluarga, dan Orientasi Kemitraan sebanyak 3 kali, dengan pagu yang tersedia sebesar Rp. 80.615.900,- terrealisasi sebesar Rp. 80.434.900,--, atau setara dengan 99,78 %, sedangkan untuk realisasi pekerjaannya untuk Bimbingan Teknis UPPKS, Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL) sudah dilaksanakan 1 kali dan untuk Lomba-Lomba Orientasi ketahanan Keluarga, dan Orientasi Kemitraan sudah dilaksanakan 3 kali sehingga untuk pekerjaan pada kegiatan Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS sudah mencapai 100 %.

- **Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat / Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi KB (Gudang Alkon)**, dengan indicator kinerja n Pendistribusian Obat sebanyak 20 kali dan Pelaksanaan Stock Opname sebanyak 2 kali, dengan pagu yang tersedia sebesar Rp. 18.350.000,-- terrealisasi sebesar Rp. 15.600.000,-- atau setara dengan 85 %, sedangkan untuk realisasi pekerjaan pada pendistribusian obat hanya

dilakukan 17 kali, atau 85 % ini dikarenakan mengikut pada kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana jadi pendistribusian obat sesuai dengan pelaksanaan pelayanan KB dan Stock Opname sudah dilakukan 2 kali, atau 100 %.

- **Kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja** dengan indicator kinerja Pertemuan PIK KRR sebanyak 4 kali dan Pelaksanaan Rakerda sebanyak 1 kali dengan pagu yang diberikan sebesar Rp. 62.879.000,-- terrealisasi sebesar Rp. 61.679.000,-- atau setara dengan 98 %, sedangkan untuk realisasi pekerjaan pada Pertemuan PIK KRR sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali dan Pelaksanaan Rakerda sudah dilaksanakan sebanyak 1 kali sehingga pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 100 %.
- **Kegiatan Kampung KB**, dengan indicator kinerja Honor Petugas Kampung KB untuk 1 orang dan Pembentukan Kampung KB sebanyak 4 buah dengan pagu yang diberikan sebesar Rp. 36.467.000,-- dan sudah terrealisasi sebesar Rp. 36.467.000,-- atau setara dengan 100 %, sedangkan realisasi pekerjaan untuk Honor Petugas Kampung KB sudah diberikan untuk 1 orang dan Pembentukan Kampung KB sudah terbentuk Kampung KB sebanyak 4 buah Kampung KB sehingga pekerjaan untuk kegiatan Kampung KB di Tahun 2017 sudah terrealisasi 100 %.

Untuk Program Keluarga Berencana, sesuai dengan pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat kami buat diagramnya sebagai berikut :

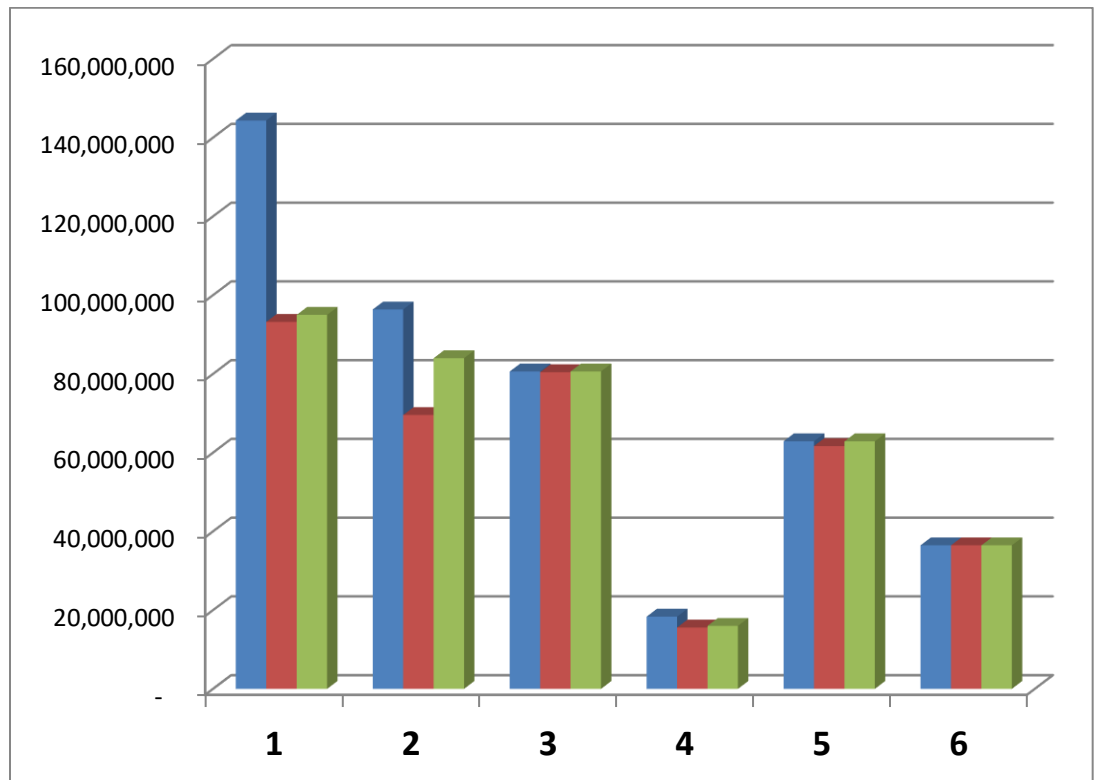
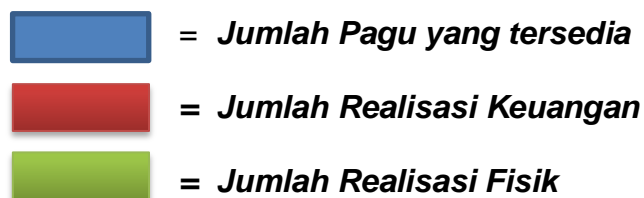


Diagram Program Keluarga Berencana

1. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
2. Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana
3. Kegiatan Bimbingan Teknis UPPKS
4. Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi KB (Gudang Alkon)
5. Kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Kegiatan Kampung KB



2. Pada Program Peningkatan Dukungan Sarana Pelayanan KB, dengan kegiatan :

- **Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan dan Penyuluhan KB**, dengan indicator kinerja tersedianya Mobil Bis Jemput Antar Akseptor KB, sebanyak 1 buah mobil bis yang mana dananya terserap dari dana DAK sebesar Rp. 550.000.000,-- dan terrealisasi sebesar Rp. 356.696.678,-- atau setara dengan 65 %, sedangkan realisasi fisik nya sudah tersedia 1 buah mobil bis atau 100 %, untuk dana yang masih tersisa tidak digunakan karena pada pembelian mobil bis berdasarkan e-katalog yang tersedia, sehingga pagu dana tidak terpakai habis.
- **Kegiatan Pembangunan Alih / Fungsi Balai Penyuluhan**, dengan indicator kinerja tersedianya Balai Penyuluh KB sebanyak 1 buah Balai, yang dananya juga berasal dari dana DAK sebesar Rp. 379.000.000,-- dan terrealisasi sebesar Rp. 333.340.000,-- atau sebesar 88 %, sedangkan realisasi fisiknya sudah tersedia 1 buah Balai Penyuluh KB yang berarti sudah mencapai 100 %.

Untuk Program Peningkatan Dukungan Sarana Pelayanan KB, sesuai dengan pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat kami buat diagram sebagai berikut :

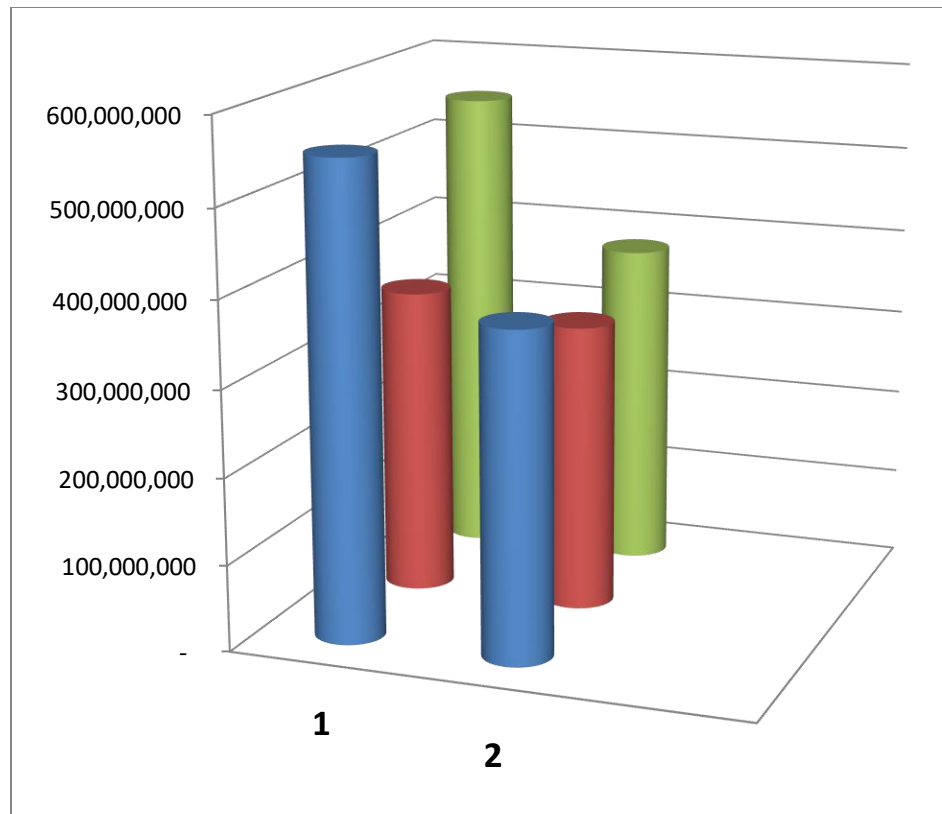
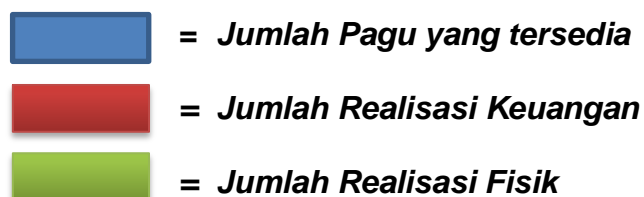


Diagram Program Peningkatan Dukungan Sarana Pelayanan KB

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan dan Penyuluhan KB
2. Kegiatan Pembangunan Alih / Fungsi Balai Penyuluhan



3. Pada Program Peningkatan Dukungan Operasional KKBPK Lini Lapangan, dengan kegiatan :

- **Kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluh KB**, dengan indicator kinerja Rapat Teknis Kelompok KB sebanyak 96 kali, terlaksananya pemeliharaan balai penyuluh 2 paket dan terlaksananya kegiatan-kegiatan di kampung KB sebanyak 25 kegiatan, dengan pagu dana yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp. 336.750.000,-- terrealisasi sebesar Rp. 167.895.000,-- atau setara dengan 49, 86 %, sedangkan dari realisasi fisik yang telah dilaksanakan adalah Rapat Teknis Kelompok KB hanya dilaksanakan sebanyak 48 kali, dimana rapat yang dilaksanakan sudah memenuhi dari rencana kerja yang dilakukan, kemudian pada pemeliharaan balai penyuluh belum terrealisasi karena waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan dengan waktu penyediaan dana selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan di kampung KB hanya dilakukan sebanyak sebanyak 13 kegiatan, dikarenakan kegiatan dimaksud hanya sebagai pendukung dari kegiatan kampung KB yang sudah tersedia pagunya pada APBD kegiatan Kampung KB, jadi realisasi fisik dari kegiatan Operasional Bagi Balai Penyuluh KB, hanya terlaksana sebesar 50 %.

Untuk Program Peningkatan Dukungan Operasional KKBPK Lini Lapangan, sesuai dengan pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat kami buat diagramnya sebagai berikut :

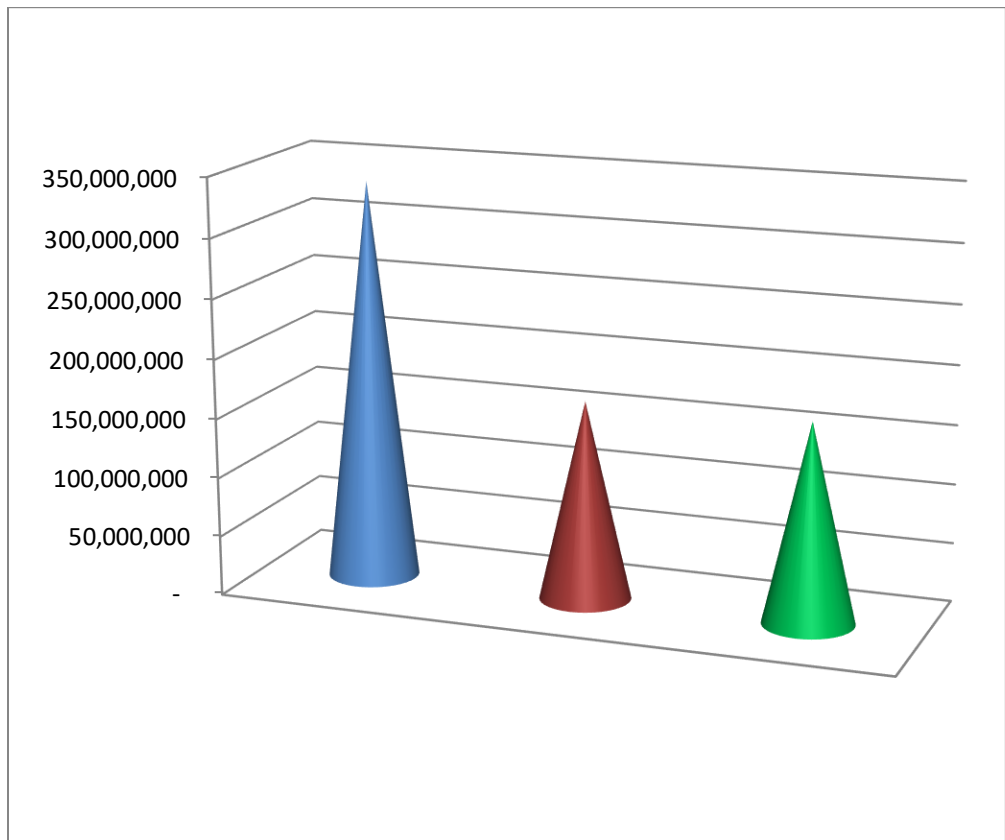


Diagram Program Peningkatan Dukungan Sarana Pelayanan KB

**Dengan Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi
Pelayanan dan Penyuluhan KB**

- = **Jumlah Pagu yang tersedia**
- = **Jumlah Realisasi Keuangan**
- = **Jumlah Realisasi Fisik**

4. Pada Program Pengendalian Kependudukan, dengan kegiatan :

- **Kegiatan Desiminasi Dampak Kependudukan**, dengan indicator kinerja Sosialisasi Dampak Peningkatan Jumlah Penduduk dengan target sebanyak 480 orang, diberikan pagu sebesar Rp. 56.850.000,-- dan terrealisasi dana sebesar Rp. 53.100.000,-- atau setara dengan 93 %, dengan realisasi fisik yang dilakukan pada pelaksanaan Sosialisasi Dampak Peningkatan Jumlah Penduduk dengan peserta sebanyak 500 orang, sehingga untuk realisasi fisik kegiatan Desiminasi Dampak Kependudukan mencapai 100 % lebih.
- **Kegiatan Pembinaan Forum Kerjasama Pengendalian Kependudukan**, dengan indicator kinerja Fasilitasi Koalisi Kependudukan Kota Banjarbaru untuk 1 kegiatan dan Sosialisasi Pernikahan Dini untuk 75 orang dengan pagu sebesar Rp. 37.450.000,-- dan terealisasi sebesar Rp. 35.449.000,-- atau setara dengan 95 % dengan realisasi fisik yang dilakukan pada pelaksanaan Koalisi Kependudukan sebanyak 1 kali dan sosialisasi pernikahan dini dengan peserta sebanyak 75 orang, sehingga untuk realisasi fisik pada kegiatan Pembinaan Forum Kerjasama Pengendalian Kependudukan mencapai 100 %.

Untuk Program Pengendalian Kependudukan, sesuai dengan pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat kami buat diagramnya sebagai berikut :

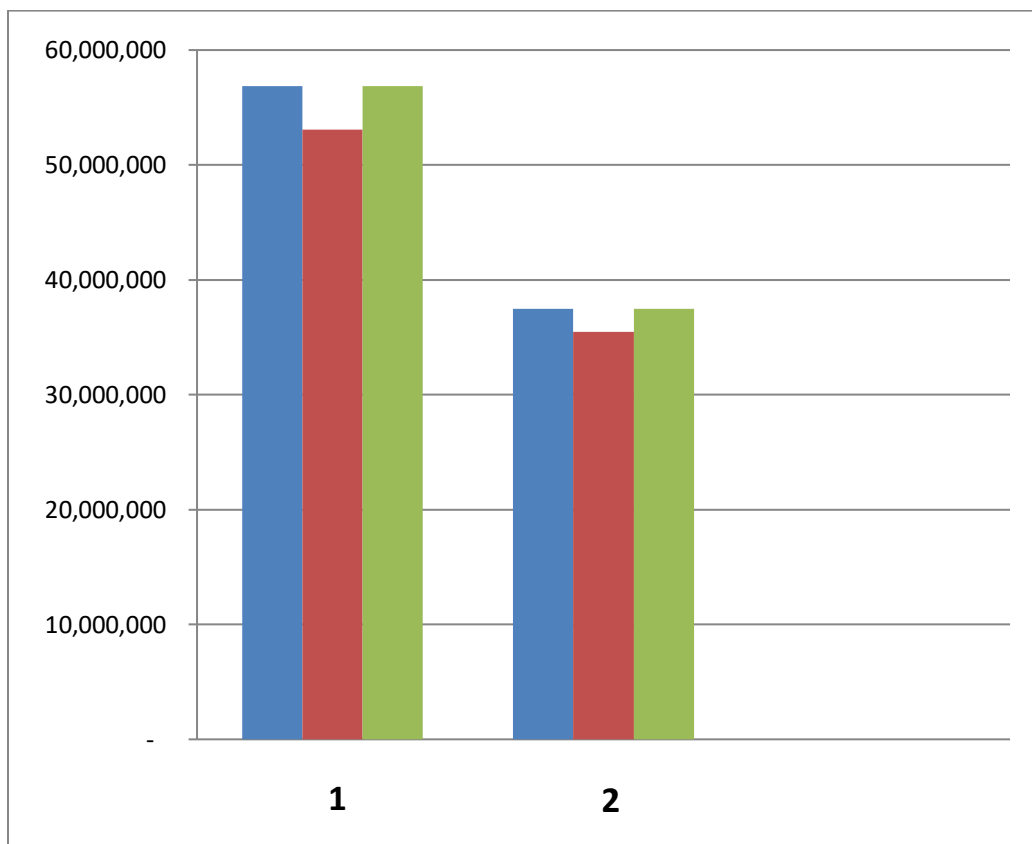
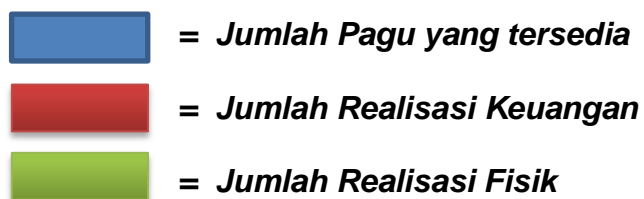


Diagram Program Pengendalian Kependudukan

1. Kegiatan Desiminasi Dampak Kependudukan
2. Kegiatan Pembinaan Forum Kerjasama Pengendalian Kependudukan



5. Pada Program Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan Keluarga berencana, dengan kegiatan :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Kependudukan dan Keluarga

Berencana, kegiatan ini adalah merupakan Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan mulai Januari 2017 telah menggunakan data dasar hasil Pendataan Keluarga yang tersimpan dalam aplikasi mdkku.net/data.

Penggunaan aplikasi mdkku.net/data untuk laporan secara online menggunakan sarana android yang telah diberikan kepada Petugas Lapangan KB dan username per PKB untuk mengakses formulir online dengan tujuan efektifitas dan efisiensi waktu pencatatan dan pelaporan agar bisa tersedia data yang valid dan tepat waktu.

Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi tentang pencapaian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dilaporkan secara rutin setiap bulannya melalui program aplikasi statistik rutin berbasis web, yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengelolaan data dan informasi program KKBPK disetiap tingkatan wilayah guna memperoleh data laporan yang cepat, lengkap dan akurat.

Maksud dari kegiatan ini adalah :

1. Diharapkan dengan adanya pemantapan pencatatan dan pelaporan bagi PLKB semua data yang ada di klinik KB, RS,

Puskesmas dan tempat pelayanan lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, lengkap dan akurat.

2. Pentingnya pelatihan pemantapan pencatatan dan pelaporan ini dimana keberhasilan suatu program KB dan pembangunan keluarga, salah satunya tersedianya data dan informasi yang dilakukan PLKB sebagai ujung tombak dilapangan.
3. Dengan disajikannya Laporan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan capaian program.
4. Laporan membantu dalam hal memonitor dan mengevaluasi program yang dijalankan melalui data-data yang ditampilkan.

Dan kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Output kegiatan adalah Penyusunan Laporan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebanyak 12 Laporan Umpan Balik dan Mutasi Data Keluarga.
- b. Outcome (hasil) yang direncanakan dari kegiatan ini adalah tersajinya data laporan yang cepat, tepat, valid dan akurat.
- c. Sasaran (kinerja) adalah seluruh Lapisan masyarakat.
- d. Tujuan (dampak) adalah meningkatkan kualitas data informasi yang disajikan secara rutin melalui laporan ulasan umpan balik dan mutasi data keluarga. Dan data yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga program KKBPK menjadi salah satu program utama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dengan tujuan kegiatan agar tersajinya Data Laporan Umpan Balik dan Mutasi Data Keluarga, serta indicator kinerja Laporan Umpan Balik selama 12 bulan, Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana sebanyak 10 buah dan Reviu Umpan Balik untuk 2 kegiatan, dengan pagu sebesar Rp. 30.375.000,-- terealisasi sebesar Rp. 21.062.500,-- atau setara dengan 69 %, dengan realisasi fisik yang dilakukan pada pelaksanaan Laporan Umpan Balik sudah dilakukan selama 12 bulan, dan Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana telah dibuat sebanyak 10 buah serta Reviu Umpan Balik sudah dilaksanakan untuk 2 kegiatan, jadi realisasi fisik pekerjaan untuk kegiatan Penyusunan Laporan Kependudukan dan Keluarga Berencana telah dilaksanakan 100 %, sementara untuk realisasi keuangan yang hanya mencapai 70 % karena pada pelaksanaan kegiatan untuk biaya penyewaan stand pameran, makan minum, dan biaya cetak hanya dipakai sebagian, karena disesuaikan dengan HSPK.

- **Kegiatan Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan KB,** kegiatan ini merupakan kegiatan Kegiatan Penyediaan data informasi kependudukan dan keluarga berencana terdiri dari Kegiatan Orientasi, Sosialisasi, Penyuluhan dan Sarasehan yang dilaksanakan untuk penyajian data yang sudah diinput, mengupdate data keluarga yang sudah ada setahun sekali, sehingga diharapkan data yang ada dapat digunakan dengan

semaksimal mungkin untuk menentukan target sosialisasi PUP, Wanita usia subur yang belum menikah, wanita usia subur yang sudah ber KB dan mix kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB aktif.

Kegiatan Orientasi, Sosialisasi, Penyuluhan dan Sarasehan diharapkan dapat lebih memahami proses penginputan data sehingga data yang dihasilkan dapat akurat dan dapat tepat waktu. Disamping itu Tersedianya data keluarga yang cepat, tepat dan akurat yang dilakukan oleh petugas pendata dan updating data keluarga di setiap wilayah dibantu oleh Penyuluh Lapangan dan kader pendata di lapangan selalu dimonitoring agar data yang terkumpul dan disajikan dapat nantinya dievaluasi agar data yang dikumpulkan benar dan valid. Sehingga hasil dari Updating pendataan keluarga ini menjadi bahan masukan/acuan bagi pengambil keputusan.

Maksud dari kegiatan ini adalah :

1. Diperolehnya/tersajinya data basis keluarga, anggota keluarga dan individu yang memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh keadaan di lapangan sampai ke tingkat keluarga tentang hasil-hasil pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional yang dapat digunakan untuk kepentingan operasional langsung di lapangan.
2. Menghasilkan data dan Informasi.

3. Penetapan kebijaksanaan, perencanaan, pengendalian dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkatan.
4. Yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :
 - a. Output kegiatan adalah sosialisasi, Sarasehan, Orientasi dan Penyuluhan 650 orang.
 - b. Outcome (hasil) yang direncanakan dari kegiatan ini adalah Tersedianya Data Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - c. Sasaran (kinerja) adalah Koordinator PLKB, Penyuluh KB dan Kader Pendata.
 - d. Tujuan (dampak) adalah Menghasilkan Data Informasi yang cepat, tepat dan akurat.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar tersedianya Data Keluarga di Kota Banjarbaru dengan indicator kinerja Pemutakhiran Data Keluarga sebanyak 55.000 KK, Data Analisa Hasil Pendataan Keluarga selama 10 bulan, Data Rekap Laporan Dalap dan Pelkon selama 12 bulan, Orientasi Pendataan Keluarga sebanyak 250 orang, Orientasi Pencatatan Pelaporan KB sebanyak 50 orang, Rapat Koordinasi Pendataan sebanyak 3 kali, Sarasehan Pendataan Keluarga Tk. Kota, Kecamatan dan seluruh Kampung KB sebanyak 7 kali, Sosialisasi Updeting Data Keluarga sebanyak 1 kali dan Penyuluhan KB sebanyak 1 kali, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 113.416.000,-- terrealisasi sebesar Rp. 59.075.600,--

atau setara dengan 52 %, dengan realisasi fisik pekerjaan keseluruhan sudah mencapai 100 %, sementara untuk realisasi keuangan yang hanya mencapai 52 % dikarenakan ada dana yang tidak diambil sebab pembayaran untuk pemutakhiran data tidak sesuai dengan HSPK Kota Banjarbaru tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/340/KUM/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

Dari kedua kegiatan diatas, karena kegiatannya saling mendukung, jadi untuk pendataan keluarga tidak terealisasi dikarenakan sudah ada kegiatan up-dating Data Keluarga.

Solusi yang akan dilaksanakan kedepannya kami akan merencanakan anggaran untuk diperbaiki kembali sesuai dengan keperluan agar pendataan keluarga / pemuktahiran data keluarga (pertumbuhan keluarga, migrasi keluarga, dll) dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

Untuk Program Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, sesuai dengan pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat kami buat diagramnya sebagai berikut :

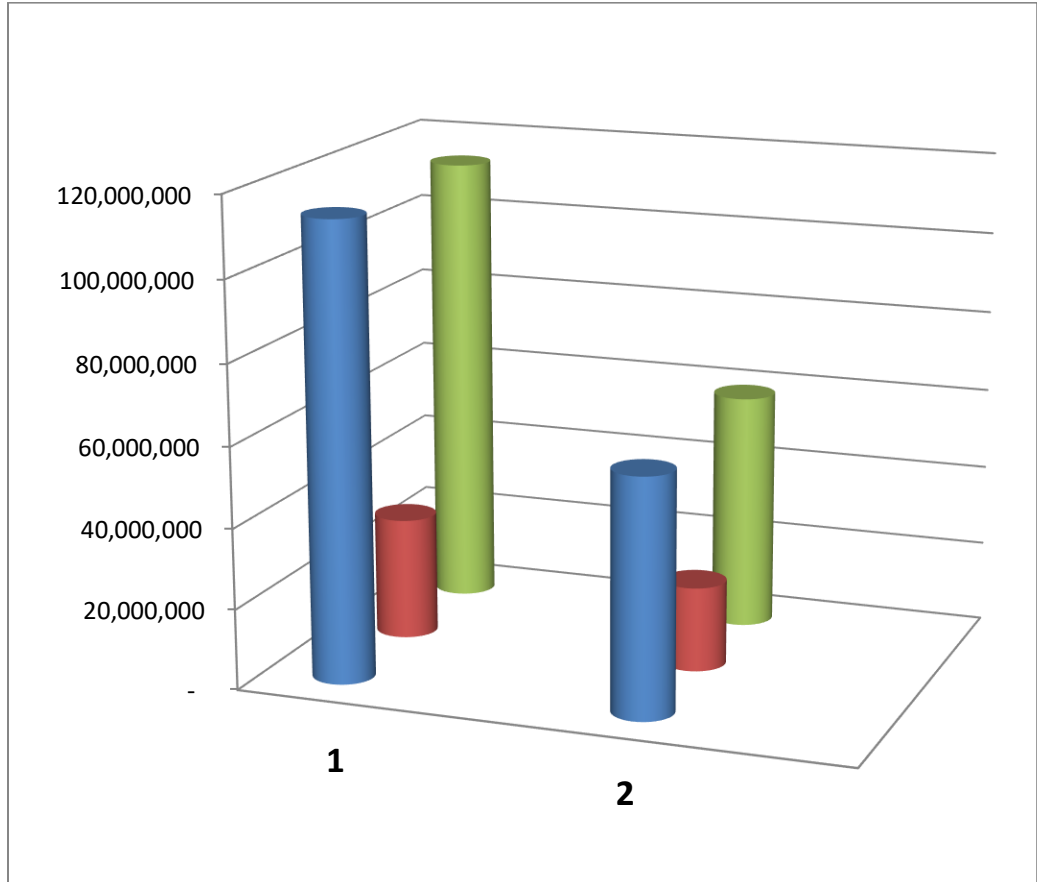
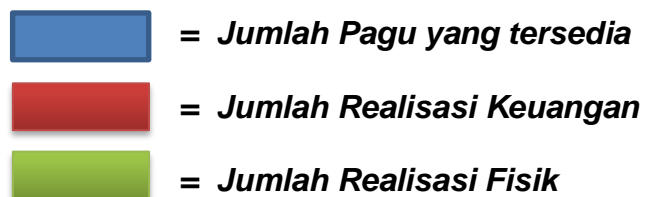


Diagram Program Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan Keluarga berencana

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kependudukan dan Keluarga Berencana
2. Kegiatan Penyediaan Data Informasi Kependudukan dan KB



6. Pada Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan, dengan kegiatan :

- **Kegiatan Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan**, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayah Kalimantan Selatan yang lebih diarahkan pada (1) peningkatan peran aktif dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab. (2) membangun keswadayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, sehingga mampu mengelola pembangunan di desa / kelurahan secara mandiri dan berkesinambungan, (3) mewujudkan sinergi peran Dinas/Instansi sektoral, Swasta , Organisasi Kemasyarakatan dalam memberikan fasilitasi yang mendukung dan melengkapi program yang diputuskan oleh masyarakat, dengan maksud dan tujuan untuk ***Mewujudkan Kemandirian masyarakat , melalui pendekatan TRIDAYA. Pertama*** pemberdayaan Manusia dengan fokus memberdayakan rumah tangga miskin yang rentan (RTMR). ***Kedua*** Pemberdayaan lingkungan fokus kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan yang ***Ketiga*** adalah pemberdayaan ekonomi dengan sasaran rumah tangga miskin berpotensi (RTMB), dengan target kinerja Kelompok UPK se Kota Banjarbaru serta dengan indicator kinerja

Lokakarya Gerbangmas Taskin sebanyak 1 kali, dan Peningkatan Wawasan sebanyak 1 kali, dengan pagu anggaran yang diberi sebesar Rp. 25.934.000,-- terealisasi sebesar Rp. 21.402.000,-- atau setara dengan 83 % sedangkan untuk realisasi fisik pekerjaan untuk Lokakarya Gerbangmas Taskin telah dilaksanakan 1 kali, dan Peningkatan Wawasan juga telah dilaksanakan 1 kali, jadi untuk realisasi fisik pekerjaan untuk kegiatan Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan, telah selesai dilaksanakan 100 %.

- **Kegiatan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**, kegiatan ini dilaksanakan oleh LPM dengan masyarakat dengan cara gotong royong, sehingga sangat terlihat adanya kebersamaan dalam mendukung kemajuan pembangunan di Kelurahan. Yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan, dengan target kinerja terlaksananya Kerukunan Masyarakat, dengan indicator kinerja Pencanangan BBGRM Tingkat Kota sebanyak 1 kali, Peningkatan Wawasan sebanyak 1 kali dan Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi sebanyak 1 kali, dengan pagu anggaran yang diberikan sebanyak Rp. 26.447.100,-- terealisasi sebesar Rp. 23.425.000,-- atau setara dengan 89 %, sedangkan untuk realisasi

fisik pekerjaan untuk Pencanaan BBGRM Tingkat Kota sudah dilakukan sebanyak 1 kali, Peningkatan Wawasan sebanyak 1 kali dan PencanaanBBGRM Tingkat Provinsi sebanyak 1 kali, sehingga untuk realisasi fisik pada kegiatan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sudah mencapai 100 %.

- **Kegiatan Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan**, lembaga ini adalah suatu Lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarbaru yang Sudah ada dan terbentuk kelembagaannya mulai dari tingkat kelurahan ,tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kota, serta perlu adanya dukungan dari pemerintah kota untuk membina menguatkan kelembagaan yang ada di masyarakat guna mewujudkan partisipasi yang berkembang di masyarakat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan bisa terwujud capaian kinerja yang di inginkan oleh masyarakat, Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk Mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ,pelaksanaan,serta pengendalian pembangunan dan Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam bidang agribisnis maupun bidang –bidang yang lain serta bertujuan Meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan indicator kinerja terlaksananya pertemuan rutin LPM

sebanyak 5 kali, terlaksananya Sosialisasi Program Kegiatan LPM sebanyak 5 kali, dengan pagu anggaran yang diberikan sebanyak Rp. 40.000.000,-- terealisasi sebesar Rp. 39.300.000,-- atau setara dengan 98 %, sedangkan untuk realisasi fisik pekerjaan untuk pelaksanaan pertemuan rutin LPM sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali, pelaksanaan Sosialisasi Program Kegiatan LPM sebanyak 5 kali, sehingga untuk realisasi fisik pada kegiatan Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan telah mencapai 100 %.

- **Kegiatan Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat**, pada dasarnya kegiatan ini sangat keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan, tetapi kegitanan sosialisasi disini mempunyai indicator Sosialisasi KPM sebanyak 3 kali, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.307.650,-- terealisasi setara dengan Rp. 21.556.600,-- atau setara dengan 76 % sedangkan untuk realisasi fisik pekerjaan pada pelaksanaan Sosialisasi KPM sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali, sehingga untuk realisasi fisik pada kegiatan sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat telah mencapai 100 %, sedangkan untuk dana keuangan yang belum terealisasi adalah untuk pembelian kelengkapan computer, pagu tidak diambil keseluruhan karena pembelian memakai standart e-catalog, jadi harga masih tersisa.

- **Kegiatan Lomba Kelurahan**, kegiatan pada tahun ini mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan peraturan yang semula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan digantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Evaluasi perkembangan kelurahan dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Pusat, dimana Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kelurahan sedangkan Instrumen Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan selanjutnya untuk penilaian Lomba Kelurahan ditentukanlah Tim Penilai berdasarkan Berdasarkan SK Walikota Banjarbaru Nomor.188.45/170/KUM/2017 tanggal 6 April 2017 tentang

Pembentukan Tenaga Ahli Juri Penilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Banjarbaru Tahun 2017.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Lomba Kelurahan Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan agar dapat Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan kelurahan dengan maksud untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu januari sampai dengan desember, dengan indicator kinerja terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat di Kelurahan melalui Lomba Kelurahan sebanyak 5 kali, dengan pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp. 233.805.000,-- terealisasi sebesar Rp. 229.305.000,-- atau setara dengan 98 %, sedangkan untuk realisasi fisik pekerjaan pada pembinaan kelompok masyarakat di Kelurahan melalui Lomba Kelurahan sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali, yang pada akhirnya terpilih satu Kelurahan untuk diikutkan mewakili Kota Banjarbaru sebagai peserta untuk Lomba Kelurahan pada Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Predikat Juara Pertama, dan dilanjutkan untuk mengikuti Lomba Kelurahan pada Tingkat Nasional, Tahun 2017.

Untuk Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan, sesuai dengan pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat kami buat diagramnya sebagai berikut :

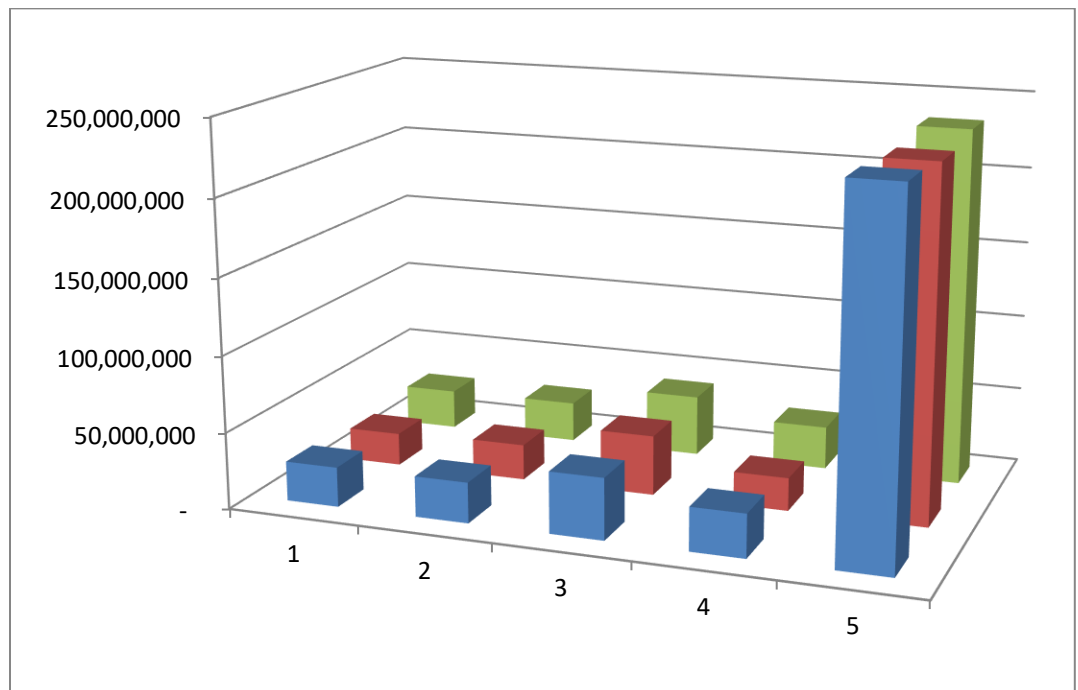
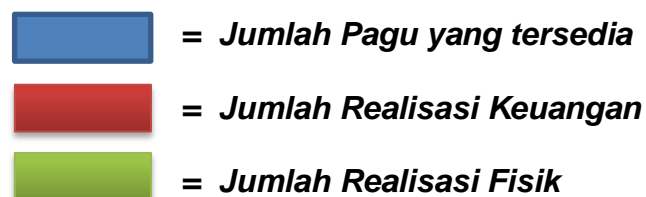


Diagram Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

1. **Kegiatan Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan**
2. **Kegiatan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**
3. **Kegiatan Pembinaan Kelembagaan LPM Kelurahan**
4. **Kegiatan Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat**
5. **Kegiatan Lomba Kelurahan**



7. Pada Program Keberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan :

- **Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu,**
dimana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) merupakan wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dengan bimbingan dari petugas kesehatan, lintas sector dan lembaga terkait.

Konsep Dasar Posyandu merupakan Implementasi Dari Permendagri No. 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Pokjanal Posyandu.

Dasar Hukum Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Tingkat Kota Banjarbaru Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/ 121 /KUM/2017 tanggal 14 Feberuari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Banjarbaru Tahun 2017 dan .Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/ 180 /KUM/2017

tanggal 7 Maret 2017 tentang Petugas / Kader Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2017.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja posyandu, dan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kinerja Pokjanal Posyandu Kota, Kecamatan dan Pokja Kelurahan dalam pembinaan Posyandu.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat Pokjanal Posyandu Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagai penggerak dan pengolah data dan informasi Posyandu.
- c. Meningkatkan efisiensi waktu penyampaian informasi dan data Posyandu dari daerah ke Pusat
- d. Meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan tindakan oleh stakeholders dalam penanganan suatu kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) kesehatan yang bersumber dari Posyandu
- e. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP).

dengan indikator Pertemuan Kader Posyandu se Kota Banjarbaru sebanyak 195 Posyandu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.630.100,-- terealisasi sebesar Rp.250.241.100,-- atau sebesar 99,84 %, sedangkan untuk realisasi fisik pekerjaan sudah dilakukan pertemuan Kader Posyandu se Kota Banjarbaru sebanyak 195

Posyandu, sehingga untuk realisasi fisik pada kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu telah mencapai 100 %.

- **Kegiatan Pembinaan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, kegiatan ini adalah merupakan Kegiatan Peningkatan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan pelaksanaan kegiatan dari TP PKK tingkat Kota Banjarbaru yang dalam hal ini bertindak sebagai mitra Pemerintah.

Gerakan PKK sendiri merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang lahir karena kebutuhan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan visi terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sejahter, serta misinya meningkatkan 10 program PKK, maka TP-PKK Kota Banjarbaru ingin mewujudkan Visi dan Misi tersebut dengan menerapkan 10 program PKK dalam kegiatan Peningkatan Peran PKK dalam Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan anak melalui pokja-pokjanya.

Maksud kegiatan ini adalah sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan maupun

tingkat Kota Banjarbaru sesuai dengan sasarannya, dengan indicator kinerja Rakon PKK 1 kali, Jambore PKK 1 kali, Lomba-Lomba PKK 1 kali dan Sosialisasi 10 kali, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 454.170.000,-- terealisasi sebesar Rp. 451.460.000,-- atau setara dengan 99,84 %, sementara untuk realisasi fisik pekerjaan sudah dilakukan Rakon PKK 1 kali, Jambore PKK 1 kali, Lomba-Lomba PKK 1 kali dan Sosialisasi 10 kali, jadi untuk realisasi fisik pada kegiatan Pembinaan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tercapai 100 %.

- **Kegiatan Gelar Sosialisasi Tepat Guna**, Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Penerapan dan Pengembangan TTG dirasa sangat diperlukan mengingat teknologi ini dirasa dekat dengan masyarakat dan mudah untuk dikembangkan..

Maksud dari kegiatan ini adalah suatu kegiatan secara terpadu dalam rangka penyebarluasan informasi berbagai jenis TTG dalam mengelola Sumber Daya Alam yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat, sebagai forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam penyusunan kebijaksanaan

pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG pada masa mendatang serta pemberian insentif kepada penemu alat TTG. Gelar Teknologi Tepat Guna (GTTG) bertujuan untuk:

a. Menampilkan dan memperkenalkan hasil-hasil inovasi TTG berupa alat dan/atau produk yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat dalam bentuk pameran;

b. Mensosialisasikan alat-alat TTG bagi masyarakat;

dengan indicator kinerja Sosialisasi Posyantek 1 kali, Lomba GTTG Tk. Kota 1 kali dan Mengikuti GTTG TK. Nasional 1 kali, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.949.900,-- terealisasi sebesar Rp. 40.694.900,-- atau setara dengan 93 %, sedangkan untuk realisasi fisik pekerjaan pada Sosialisasi Posyantek sudah dilaksanakan sebanyak 1 kali, pelaksanaan Lomba GTTG Tk. Kota 1 kali dan ikut serta dalam acara GTTG TK. Nasional 1 kali, yang bertempat di Kota Palu, kabupaten Sulawesi Tenggara, sehingga untuk realisasi fisik pada kegiatan Gelar Sosialisasi Tepat Guna telah mencapai 100 %,

Untuk Program Keberdayaan Masyarakat, sesuai dengan pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat kami buat diagramnya sebagai berikut :

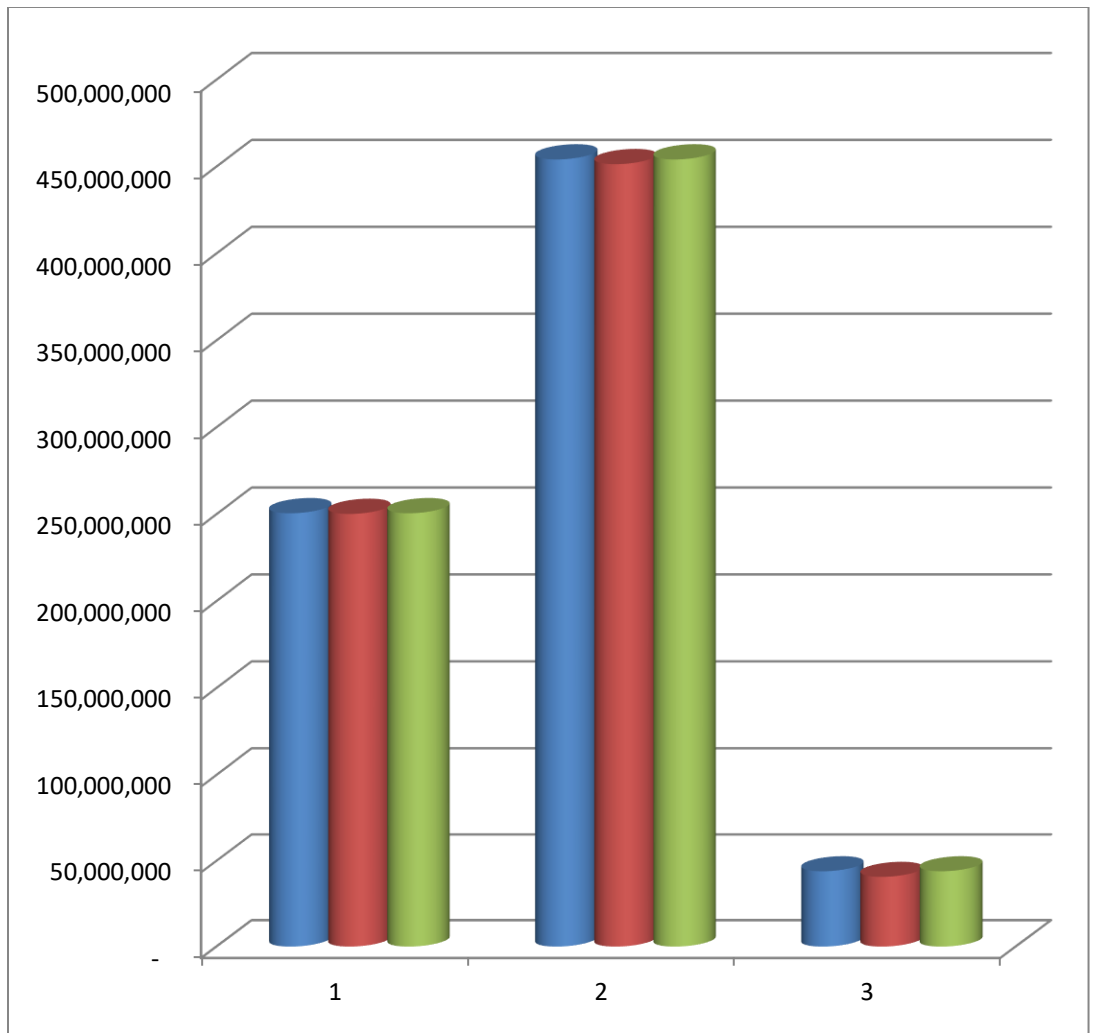
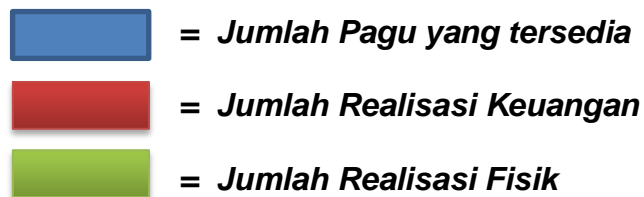


Diagram Program Keberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu
2. Kegiatan Pembinaan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Kegiatan Gelar Sosialisasi Tepat Guna



8. Pada Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan kegiatan :

- **Kegiatan Rintisan Kota Layak Anak**, dengan indicator kinerja Sosialisasi Kelurahan Ramah Anak sebanyak 4 kali, Pelatihan Kepemimpinan PAD sebanyak 1 kali dan Sosialisasi FAD sebanyak 4 kali, dengan pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp. 79.015.050,-- terealisasi sebesar Rp. 73.560.000,-- atau setara dengan 93 %, sedangkan untuk realisasi fisik pekerjaan yang sudah dilakukan adalah Sosialisasi Kelurahan Ramah Anak sebanyak 4 kali, Pelatihan Kepemimpinan PAD sebanyak 1 kali dan Sosialisasi FAD sebanyak 4 kali, sehingga untuk realisasi fisik pada kegiatan Rintisan Kota Layak Anak telah 100 % dilaksanakan, sementara dana sisa pagu yang belum digunakan adalah untuk pembelian modal asset, pada permainan anak-anak karena harganya tidak sesuai, jadi dana tidak dipergunakan semuanya.

Untuk Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, sesuai dengan pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat kami buat diagramnya sebagai berikut :

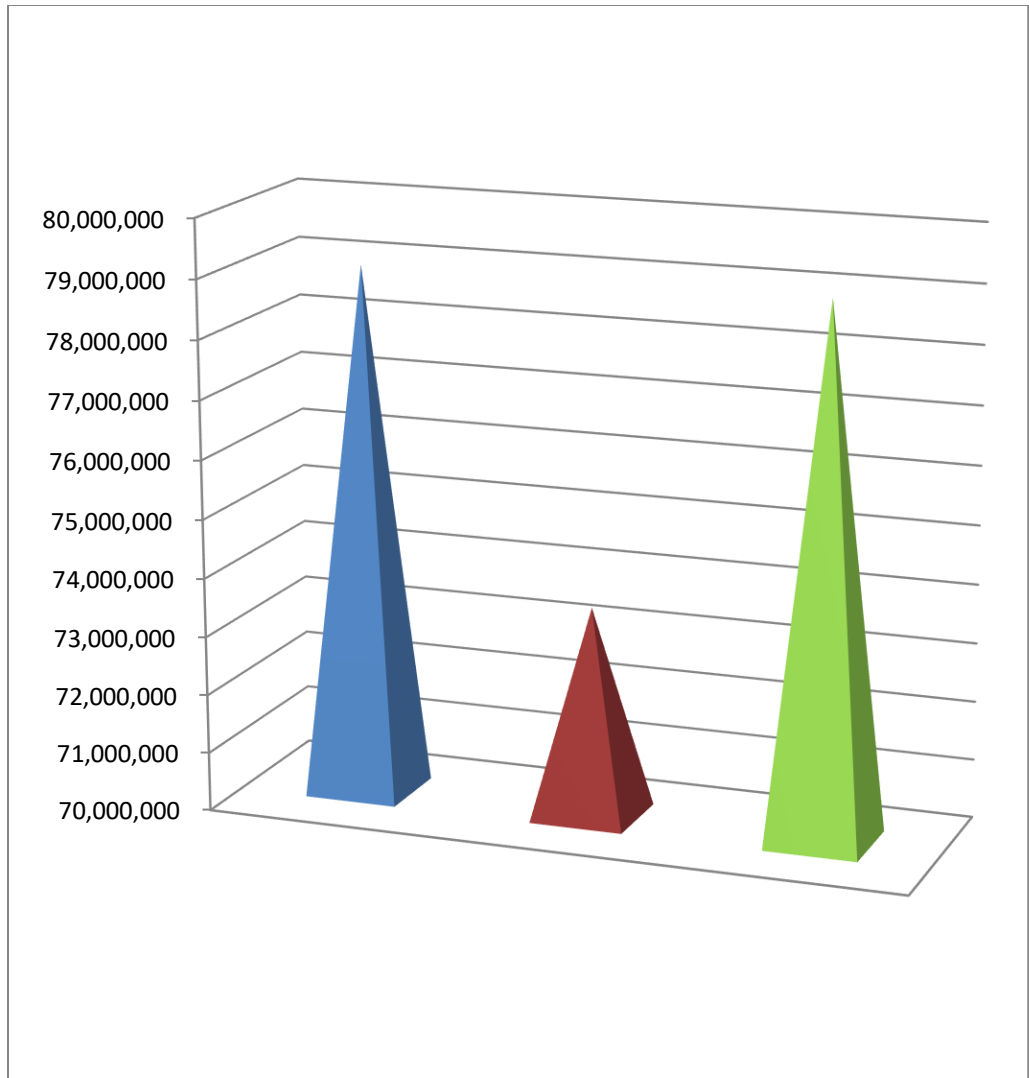


Diagram Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan,

Dengan Kegiatan Rintisan Kota Layak Anak

- = **Jumlah Pagu yang tersedia**
- = **Jumlah Realisasi Keuangan**
- = **Jumlah Realisasi Fisik**

9. Pada Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan :

- **Kegiatan Pembinaan P2WKSS, Kader PKK dan Posyandu,**
dengan indicator kinerja Pembinaan P2WKSS dan GSI sebanyak 2 kali, Sosialisasi P2WKSS dan GSI sebanyak 2 kali, Pelatihan Keterampilan Wanita 1 kali dan Konsultasi dan Koordinasi 1 kali, dengan pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 82.563.000,-- terealisasi sebesar Rp. 82.075.500,-- atau setara dengan 99,41 %, sementara untuk realisasi fisik pekerjaan pada Pembinaan P2WKSS dan GSI telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, Sosialisasi P2WKSS dan GSI juga dilaksanakan sebanyak 2 kali, Pelatihan Keterampilan Wanita telah dilaksanakan 1 kali dan Konsultasi dan Koordinasi sebanyak 1 kali, sehingga untuk kegiatan Pembinaan P2WKSS, Kader PKK dan Posyandu telah mencapai 100 %.
- **Kegiatan Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri,**
dengan indicator kinerja Pembinaan Desa Prima sebanyak 5 kali dan Konsultasi dan Koordinasi keluar daerah sebanyak 1 kali, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 65.709.900,-- terealisasi sebesar Rp. 59.359.500,-- atau setara dengan 90 %, sementara untuk realisasi fisik pekerjaan pada Pembinaan Desa Prima sebanyak 5 kali dan Konsultasi dan Koordinasi keluar daerah sebanyak 1 kali, jadi untuk kegiatan Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri telah dilaksanakan 100 %, sedangkan sisa

dana 10 % dikarenakan adanya penyesuaian untuk biaya nara sumber pada pembinaan Desa Prima.

- **Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak**, dengan indikator kinerja Sosialisasi Satgas P2TP2A dan Sosialisasi P2TP2A sebanyak 2 kali, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.475.650,-- terealisasi sebesar Rp. 17.636.300,-- atau setara dengan 75 %, sedangkan untuk realisasi fisik pekerjaan pada pelaksanaan Sosialisasi Satgas P2TP2A dan Sosialisasi P2TP2A telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, sehingga pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak telah mencapai 100 %, sementara sisa dana 25 % dikarenakan penghematan untuk biaya pembelian Makan Minum pada acara sosialisasi dimaksud.

Untuk Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, sesuai dengan pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat kami buat diagramnya sebagai berikut :

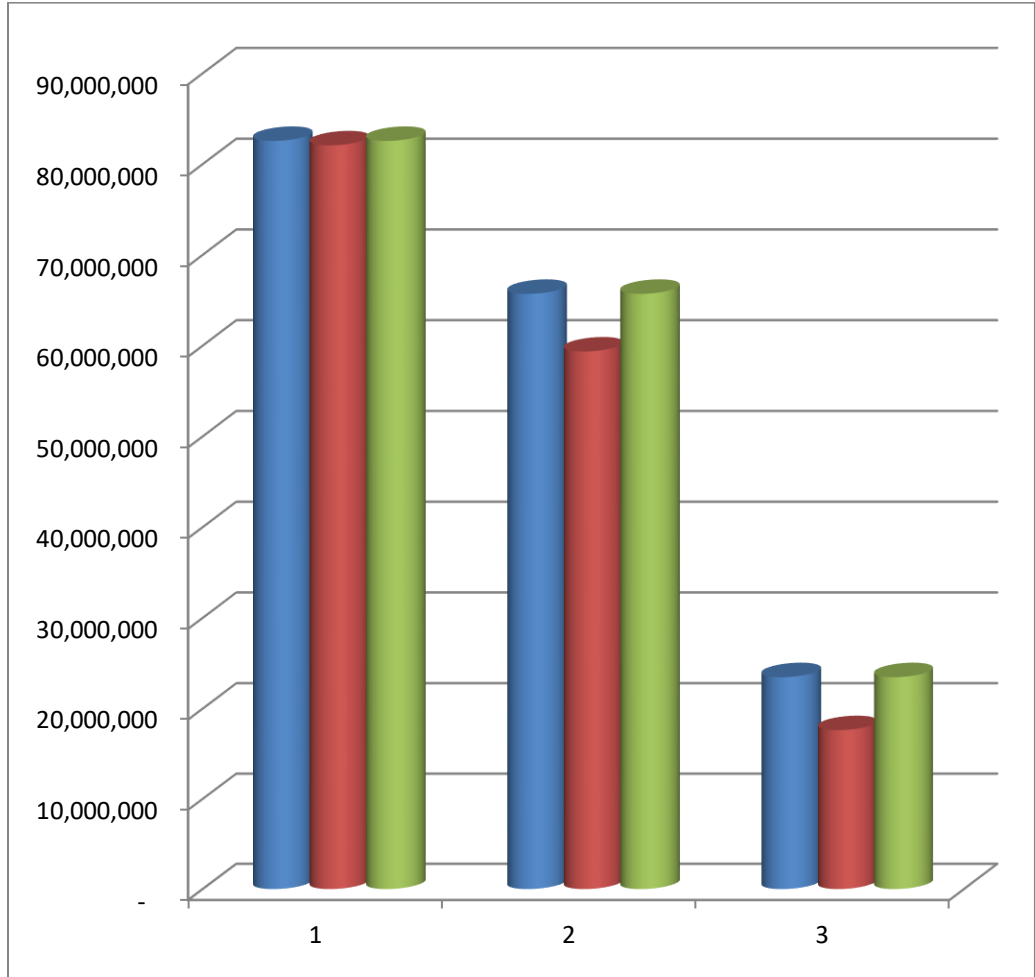


Diagram Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pembinaan P2WKSS, Kader PKK dan Posyandu
2. Kegiatan Pembinaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri
3. Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak

= Jumlah Pagu yang tersedia
 = Jumlah Realisasi Keuangan
 = Jumlah Realisasi Fisik

10. Pada Program Peran Serta dan Kestaraan Gender dalam Pembangunan

- **Kegiatan Sosialisasi Kestaraan Gender dalam Pembangunan**
dengan indicator kinerja Pengetahuan dan Keterampilan Teknis para Aparatur sebanyak 2 kali, dengan pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp. 39.441.000,-- terealisasi sebesar Rp. 36.572.370,-- atau setara dengan 93 %, sedangkan realisasi fisik pekerjaan pada pengetahuan dan keterampilan teknis para aparatur telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, sehingga pekerjaan pada kegiatan Sosialisasi Kestaraan Gender dalam Pembangunan mencapai 100 %, sementara untuk realisasi keuangan yang tidak terlaksana pada keperluan biaya pembelian alat personal computer, dikarenakan penggunaan dana tidak semua digunakan, disamping itu pada waktu pengerjaan administrasi Kestaraan Gender dalam pembangunan tidak ada mengalami hambatan yang cukup berarti dalam penggunaan computer yang ada.
- **Kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)**
dengan indicator kinerja terlaksananya peringatan hari besar nasional sebanyak 1 kali, terlaksananya peringatan hari besar Islam sebanyak 1 kali, terlaksananya kegiatan rutin bulanan sebanyak 10 kali, dan terlaksananya pelatihan keterampilan sebanyak 1 kali, dengan pagu anggaran sebesar Rp.

124.280.000,-- terealisasi sebesar Rp. 112.805.000,-- atau setara dengan 91 %, sedangkan realisasi fisik pekerjaan pada peringatan hari besar nasional telah dilakukan sebanyak 1 kali, telah dilaksanakan peringatan hari besar Islam sebanyak 1 kali, begitu pula untuk kegiatan rutin bulanan telah dilakukan sebanyak 10 kali, dan serta pelaksanaan pelatihan keterampilan sebanyak 1 kali, sehingga pekerjaan pada kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) telah mencapai 100 %, sementara untuk sisa dana yang tidak direalisasikan adalah pada pembelian makan minum untuk rapat, karena pada pelaksanaannya dilakukan penghematan biaya makan minum jadi biaya dimaksud tidak dipakai keseluruhan.

- **Kegiatan Pembinaan Organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)** dengan indicator kinerja terlaksananya peringatan hari besar nasional sebanyak 1 kali, terlaksananya peringatan hari besar Islam sebanyak 1 kali, terlaksananya kegiatan rutin bulanan sebanyak 12 kali, terlaksananya pelatihan keterampilan sebanyak 1 kali dan terlaksananya seminar 1 kali, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.800.000,-- terealisasi sebesar Rp. 107.338.000,-- atau setara dengan 89 %, sedangkan realisasi fisik hanya mencapai 92,30 %, ini dikarenakan pada pelaksanaan bedah rumah tidak terealisasi untuk 1 buah pelaksanaan bedah rumah.

- **Kegiatan Pembinaan Organisasi Gatriwara**, dengan indicator kinerja terlaksananya pelatihan keterampilan sebanyak 2 kali, terlaksananya kegiatan rutin bulanan sebanyak 12 kali dan terlaksananya ceramah agama sebanyak 4 kali, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.256.000,-- terealisasi sebesar Rp. 63.256.000,-- atau sebesar 100 %, sama halnya dengan realisasi fisik kegiatan telah dilaksanakan pelatihan keterampilan sebanyak 2 kali, kegiatan rutin bulanan sudah terlaksana sebanyak 12 kali dan untuk ceramah agama telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, sehingga realisasi fisik untuk kegiatan Pembinaan Organisasi Gatriwara telah selesai 100 %.
- **Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan**, dengan indicator kinerja terlaksananya pembinaan organisasi perempuan sebanyak 3 kali dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 66.129.000,-- terealisasi sebesar Rp. 62.853.435,-- atau sebesar 95 %, tetapi untuk realisasi fisik pekerjaan sudah terlaksana untuk pembinaan organisasi perempuan sebanyak 3 kali, sehingga untuk kegiatan pembinaan organisasi perempuan telah mencapai 100 %.

Untuk Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan, sesuai dengan pagu, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat kami buat diagramnya sebagai berikut :

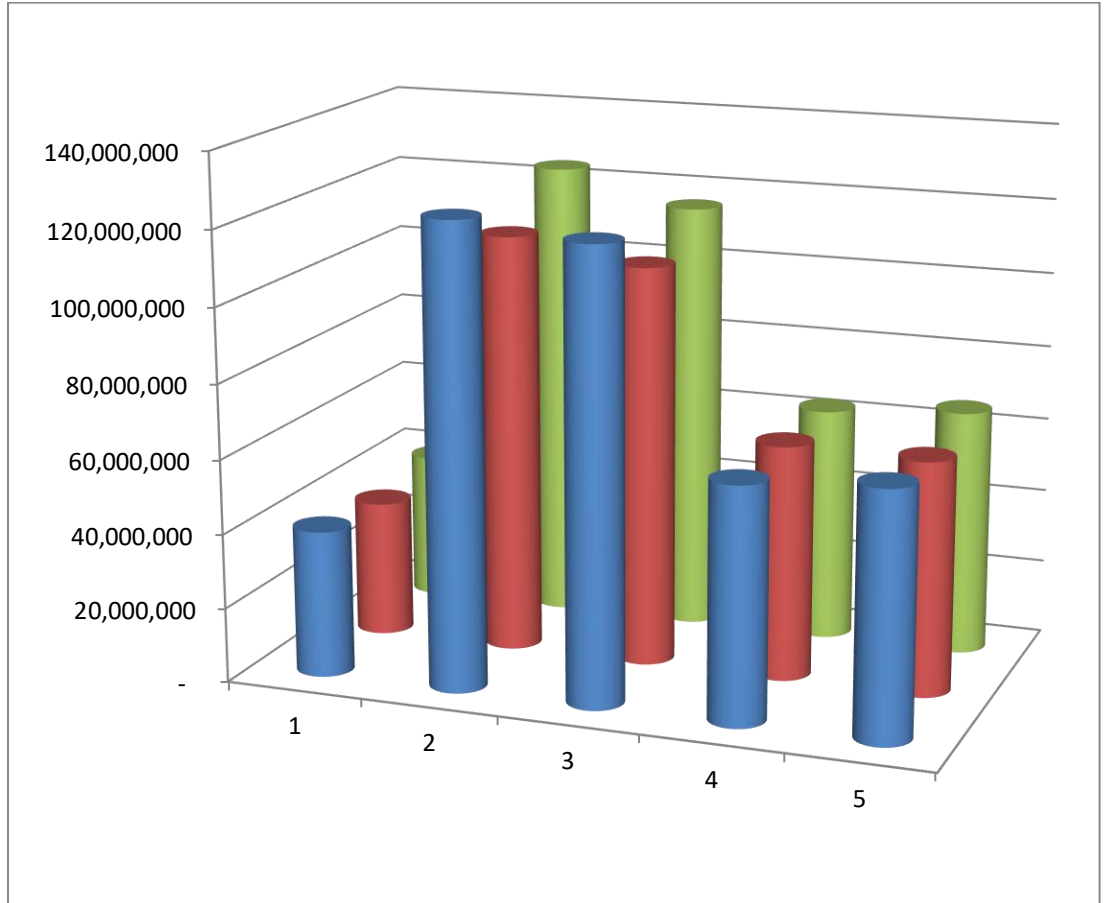


Diagram Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1. **Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**
2. **Kegiatan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)**
3. **Kegiatan Pembinaan Organisasi DWP**
4. **Kegiatan Pembinaan Gatriwara**
5. **Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan**

= **Jumlah Pagu yang tersedia**
 = **Jumlah Realisasi Keuangan**
 = **Jumlah Realisasi Fisik**

Dari seluruh uraian akuntabilitas kinerja tersebut diatas dapat kami simpulkan sebagaimana table berikut ini :

No.	Uraian	Tahun 2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	<u>Belanja Pegawai</u>	<u>Rp. 4.927.942.000,--</u>	<u>Rp. 4.627.695.942,--</u>	<u>93,90 %</u>
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 3.669.742.000,--	Rp. 3.435.009.578,--	93,60 %
	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 1.258.200.000,--	Rp. 1.192.686.364,--	94,79 %
2.	<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	<u>Rp. 4.075.799.500,--</u>	<u>Rp. 3.550.853.177,--</u>	<u>87,12 %</u>
3.	<u>Belanja Modal</u>	<u>Rp. 985.350.000,--</u>	<u>Rp. 729.517.483,--</u>	<u>74,03 %</u>
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 712.050.000,--	Rp. 489.677.483,--	68,77 %
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 254.300.000,--	Rp. 225.840.000,--	88,80 %
	- Belanja Modal Asset Lain-lain	Rp. 19.000.000,--	Rp. 14.000.000,--	73,68 %
	J U M L A H Semua	Rp. 9.989.091.500,--	Rp. 8.908.066.602,--	89,17 %

Dari table diatas bahwa untuk Realisasi Anggaran Belanja Daerah, Belanja Operasional Kegiatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2017 dari **anggaran yang diberikan sebesar Rp. 9.989.091.500,--** telah **direalisasikan dengan Belanja SKPD per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 8.908.066.602,--** atau setara dengan **89,17 %** dengan sisa paku anggaran sebesar Rp. 1.081.024.898,--

Realisasi sebagaimana dimaksudkan diatas secara rinci adalah **Belanja Tidak Langsung dari Anggaran Rp. 4.927.942.000,--** telah **direalisasikan dengan Belanja SKPD sampai dengan per 31 Desember 2017** sebesar Rp. **4.627.695.942,--** atau sama dengan **93,90 %**, dengan sisa anggaran sebesar

Rp. 300.246.058,--, yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan dari anggaran sebesar Rp. 3.669.742.000,-- telah terealisasi sebesar Rp. 3.435.009.578,-- atau setara dengan 93,60 %, dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS dari anggaran sebesar Rp. 1.258.200.000,-- telah terealisasi sebesar Rp. 1.192.686.364,-- atau setara dengan 94,79 %.

Kemudian untuk **Belanja Barang dan Jasa** dari **anggaran Rp. 4.075.799.500,--** telah **direalisasikan** dengan Belanja SKPD sampai dengan **per 31 Desember 2017** sebesar **Rp. 3.550.853.177,--** atau sama dengan **87,12 %**, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 524,946.323,--

Selanjutnya untuk **belanja Modal** dari **Anggaran Rp. 985.350.000,--** telah **direalisasikan** dengan Belanja SKPD sampai dengan **per 31 Desember 2017** sebesar **Rp.729.517.483,--** atau sama dengan **74,03 %** dengan sisa anggaran sebesar Rp. 255.832.517,--. Yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp. 712.050.000,-- telah terealisasi sebesar Rp. 489.677.483,-- atau setara dengan 68,77 %, juga untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp. 254.300.000,-- telah terealisasi sebesar Rp. 225.840.000,-- atau setara dengan 88,80 % dan Belanja Modal Aset Lain-Lain dengan anggaran sebesar Rp. 19.000.000,-- telah terealisasi sebesar Rp. 14.000.000,-- atau setara dengan 73,68 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun 2017 juga merupakan upaya pencapaian system akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, yang secara umum telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Secara umum pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya meningkatkan pelayanan KB agar dapat menyeimbangkan jumlah pengendalian penduduk, meningkatkan penyuluhan tentang ber KB dan Kesehatan Reproduksi / KIE pada remaja, calon penganten, Pasangan Usia Subur (PUS) dan kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS, juga meningkatkan / melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan

pengetahuan / pemahaman masyarakat tentang kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pengetahuan/pemahaman tentang pengarusutamaan gender.

Adapun dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2017 telah mencapai hasil yang sangat baik, dimana dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan rata-rata menghasilkan kegiatan fisik yang mencapai 100 %, sementara dana yang digunakan rata-rata hampir tidak keseluruhan terpakai, keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru juga tak lepas dari kerjasama / bantuan berbagai pihak baik dari pihak eksternal seperti keterlibatan LPM, Forum RT/RW dan lain-lain dalam urun rembuk pemikiran, dana dan tenaga serta sarana dan prasarana dalam menyelesaikan kegiatan dari program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, maupun bantuan dari dalam instansi sendiri, walaupun masih ada diantara kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, belum maksimal diselesaikan, karena dari realisasi fisik ataupun realisasi keuangan yang belum mencapai 100 %.

Selanjutnya untuk kedepannya nanti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru, akan berupaya untuk meningkatkan fungsi, efektivitas dan terus berkoordinasi serta melaksanakan kebijakan yang ada agar bisa

disinergikan dengan kebijakan dan program dari instansi-instansi terkait, sehingga apabila memungkinkan dengan adanya persamaan persepsi dan dengan sumber dana yang ada, dapat bersama melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Banjarbaru.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Banjarbaru,

Ir. Hj. PUSPA KENCANA, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19640427 199103 2 009